

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti melakukan pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi dan informasi. Pembangunan negara diperlukan modal yang sumber modalnya berasal dari penerimaan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Sumber penerimaan negara dari dalam negeri berasal dari pajak, hasil pengelolaan SDA, dan laba BUMN. Sedangkan, penerimaan negara yang berasal dari luar negeri berupa hutang luar negeri, bantuan luar negeri dan hibah dari negara lain.

Saat ini, hampir semua negara memiliki hutang luar negeri, baik negeri berkembang maupun negara maju. Dapat dibenarkan bahwa kecenderungannya adalah negara berkembang tidak memiliki modal untuk melakukan pembangunan. Negara-negara berkembang mendapatkan hutang dari luar negeri bukan hanya sebagai dukungan untuk melakukan pembangunan, tetapi juga banyak faktor lain. Salah satunya, untuk mencapai kepentingan negara pendonor. Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris dan lainnya, menyumbangkan bantuan melalui IMF, World Bank, dan lembaga bantuan keuangan lainnya di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), ataupun secara langsung memberikan hutang kepada negara yang membutuhkan. Melalui organisasi internasional non-pemerintah menyalurkannya kepada negara yang membutuhkan melalui program yang dicanangkan. Bagi negara berkembang, biasanya hutang luar negeri yang diberikan dengan suku bunga yang rendah dan tempo pengembalian yang cukup lama.

Hal ini juga terjadi terhadap negara Indonesia. Salah satu negara berkembang ini masih memiliki ketergantungan terhadap negara lain, termasuk negara maju, dengan bentuk utang luar negeri. Padahal, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan penduduk yang padat, seharusnya Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penerimaan dari dalam negeri sendiri tanpa berhutang dengan negara lain. Tahun ini saja menurut

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia memiliki ULN pada kuartal pertama mencapai US\$387,5 Miliar atau sekitar Rp5.425 triliun (kurs Rp14 Ribu per dolar AS). Terjadi kenaikan sebesar 8,7 persen dibanding tahun 2017 yaitu US\$330,04 miliar. Terjadi kenaikan terutama terjadi pada utang pemerintah yang naik sebesar 11,6% menjadi US\$181,14 miliar atau dalam rupiah sekitar Rp2.535 triliun. Sementara itu, ULN swasta hanya naik 6,3 persen menjadi US\$174,05 miliar atau sekitar Rp2.437 triliun¹. Menurut Sri Mulyani jumlah sebesar ini masih dalam batas wajar. Berbeda dengan beberapa tahun silam saat Indonesia mengalami krisis 1997-1998. ULN Indonesia saat ini cukup besar dan yang paling banyak adalah ULN swasta yang tidak bisa dikontrol pemerintah dan menjadi salah satu penyebab krisis saat itu.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah utang luar negeri negara berkembang, kami menentukan judul ”*Masalah Utang Luar Negeri di Negara Berkembang. Studi Kasus: Utang Luar Negeri Indonesia 1998 VS 2017*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ditarik rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Utang Luar Negeri di negara berkembang?
2. Apa saja faktor penyebab utang luar negeri di negara berkembang?
3. Apa saja dampak utang luar negeri bagi negara berkembang?
4. Bagaimana utang luar negeri Indonesia 1998 vs 2017?

1.3 Tinjauan Pustaka

1. Utang Luar Negeri

Utang luar negeri didefinisikan oleh sebagai bantuan luar negeri (loan) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180515185044-532-298440/kuartal-i-2018-utang-luar-negeri-indonesia-rp5425-triliun>

Internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut.² Sedangkan menurut Suparmoko, utang luar negeri merupakan utang atau pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga dari negara lain.³ Sedangkan, menurut Todaro, utang luar negeri biasa disebut juga sebagai bantuan luar negeri yang dimana merupakan bentuk seluruh pinjaman serta hibah konsensional resmi, baik dalam bentuk uang tunai maupun bentuk aktiva-aktiva lainnya, yang secara umum ditunjukkan untuk mengalihkan sejumlah sumber daya dari negara maju ke negara berkembang.⁴

Sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri merupakan seluruh bentuk pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara terhadap negara lain ataupun lembaga – lembaga internasional dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya dengan jangka waktu pembayaran yang relatif lebih lama.

2. Teori Depedensi

Teori Depedensi merupakan ketergantungan yang dianggap sebagai gejala umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga yang miskin akibat sumber daya ekonominya didominasi oleh negara-negara maju. Pada akhirnya, negara yang miskin dan tidak memiliki dana menjadi sebuah negara yang terbelakang, miskin, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil.

Menurut Theotonio Dos Santos mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut⁵.

Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran⁶.

²Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Gunadarma Press, 1993), page. 98

³Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi ke-5, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 2000), page 243

⁴Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan*, Jilid ke-2, Edisi ke-6 (Jakarta: Erlangga, 1997), page. 163

⁵ Theonio Dos Santos, review vol.60, 231.

⁶ Dos Santos, Theotonio. "The Structure of Dependence". *The American Economic Review*. Vol. 60, No. 2, Papers and Proceedings of the Eighty-second Annual Meeting of the American Economic Association. May, 1970. pp 231-236.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Utang Luar Negeri di Negara Berkembang

Utang luar negeri merupakan salah satu aspek yang memiliki dampak dan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara baik yang dimana berfungsi untuk menambah modal suatu negara itu. Sehingga tidak heran jika pemanfaatan hutang luar negeri dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan suatu negara khususnya negara-negara berkembang.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, posisi Indonesia hanya terpaut satu peringkat dari Turki yang berada di urutan ke-5. Turki memiliki utang luar negeri sebesar US\$337,5 miliar pada 2012.

Utang bersih yang masuk kenegara-negara berkembang pada periode 2012 secara keseluruhan mencapai US\$412 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan 9% dibandingkan periode tahun 2011.

Tabel 2.1 Utang Luar Negeri 2012

No	Negara	Utang Luar Negeri	
		Jumlah (US\$ miliar)	% total
1	Tiongkok	775.0	15.6
2	Brasil	440.5	9.1
3	India	379.1	7.8
4	Meksiko	354.9	7.3

5	Turki	337.5	7.0
6	Indonesia	254.9	5.3
7	Hungaria	203.8	4.2
8	Afrika Selatan	137.5	2.8
9	Kazakhstan	137.0	2.8
10	Ukraina	135.1	2.8
	Total 10 negara peminjam terbesar	3134.2	64.9
	Negara berkembang lainnya	1695.4	35.1
	Semua negara berkembang	4829.6	100.0

Sumber: kabar24.bisnis.com

Dalam perkembangannya utang luar negeri atau yang biasa disebut sebagai pinjaman luar negeri dapat berasal dari badan – badan internasional seperti *World Bank*, *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank* dan kreditor bilateral yang meliputi negara-negara seperti Jepang, Jerman, Perancis dan lain-lain), dan juga Kredit Ekspor. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeripun dibedakan atas dua jenis yakni⁷:

- Pinjaman Program

Dalam hal ini utang luar negeri dapat digunakan sebagai budget support yang berguna untuk memenuhi berbagai kegiatan ataupun kebijakan untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium seperti program pengentasan

⁷Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Gunadarma Press, 1993), h. 98

kemiskinan , pendidikan, pemberantasan korupsi, pemberdayaan masyarakat, kelaparan, climate change)

- Pinjaman Proyek

Dalam hal ini yang dimaksud oleh pinjaman proyek adalah utang luar negeri ataupun pinjaman luar negeri dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di suatu negara.

2.2 Faktor Penyebab Utang Luar Negeri di Negara Berkembang

Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pinjaman luar negeri pada negara berkembang, yaitu:

1. Kondisi anggaran negara yang terus mengalami defisit

Defisit anggaran yaitu kondisi dimana jumlah anggaran pendapatan negara lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja negara.⁸ Untuk mencukupi pembiayaan pembangunan yang sudah disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus menutupi defisit tersebut dengan cara melakukan pinjaman luar negeri.

2. Meningkatnya kebutuhan investasi

Beberapa negara berkembang menghadapi *investment-saving gap*, yaitu kondisi dimana jumlah dana tabungan tidak sebanding dengan kebutuhan investasi. Dengan adanya gap tersebut akan mendorong meningkatnya pinjaman luar negeri, terutama pinjaman pada sektor swasta. Selain terdapat kelangkaan dana, meningkatnya jumlah peminjaman dari luar negeri juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.

3. Meningkatnya inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh

⁸<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/20/180108026/sri.mulyani.ungkap.penyebab.utang.ri.terus.naik>

berbagai faktor. Laju inflasi dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Rendahnya suku bunga berdampak pada berkurangnya minat orang untuk berinvestasi. Dengan kondisi seperti itu, dalam memenuhi belanja negaranya, pemerintah akan melakukan pinjaman luar negeri.

2.3 Dampak Utang Luar Negeri di Negara Berkembang

Hutang luar negeri memberikan dampak bagi negara berkembang. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang positif dan dapat berupa dampak yang negatif. Seperti berikut:

a. Dampak Positif

Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga hutang luar negeri menghasilkan *multiplier effect* positif terhadap perekonomian, kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan perkapita.⁹

b. Dampak Negatif

Dampak adanya hutang luar negeri, yang diberikan baik secara pinjaman modal atau investasi jika dilihat berdasarkan teori *Dependency* menurut Paulo Freire, maka hutang luar negeri hanya akan menimbulkan permasalahan, atau dapat dikatakan hutang luar negeri ini berdampak negatif bagi negara berkembang, hal ini di jelaskan pada teori *Dependency* dimana negara

⁹https://www.academia.edu/11334737/Pengaruh_Hutang_Luar_Negeri_Terhadap_Investasi_di_Indonesia

berkembang akan ketergantungan terhadap modal yang diberikan oleh negara maju.

Dalam hal ini, jika dilihat lebih jauh mengenai dampak negatif dari adanya hutang luar negeri di negara berkembang, tidak terlepas dari adanya tujuan politik dan ekonomi negara maju, sebab hutang luar negeri ini dipengaruhi juga dengan adanya politik, dimana elit pemerintah akan berusaha menekan untuk menerapkan kebijakan yang kerap kali tidak sesuai dengan pemerintah. Selain itu, hal ini akan menyebabkan adanya eksploitasi terhadap negara berkembang, akibat adanya hutang luar negeri itu sendiri.

Selain itu, utang luar negeri apabila dilihat dari teori *Dependency* akan terlihat ketergantungan yang jelas pada sektor ekonomi di negara berkembang yang akan mengakibatkan adanya permasalahan moneter, selain masalah moneter, permasalahan yang mungkin muncul adalah permasalahan jalan dagang, dimana harga ekspor akan bergantung pada pasar global, dan mungkin saja dengan adanya substitusi impor yang diberika oleh negara maju kepada negara berkembang, akan mengakibatkan negara berekembang semakin ketergantungan dengan negara maju, hal ini yang akan menyebabkan hutang luar negeri sulit terbayar karena walaupun sudah diberikan pinjaman ataupun ada investasi asing, namun negara berekembang masih belum bisa memanfaatkan pinjaman dan malah menambah permasalahan hutang luar negeri, karen negara berkembang masih ketergantungan terhadap teknologi yang dimiliki oleh negara maju.

Pada penelitian Karagol (1999) dengan metode 3SLS tentang *External Debt and Economic Growth Relationship Using the Simultaneous Equations*. Penelitian ini menunjukkan, pembayaran hutang berhubungan dengan total pinjaman tahun sebelumnya dan ekspor tahun sebelumnya juga. Aliran modal masuk dari pinjaman atau hutang luar negeri dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Sedang pengaruh langsung pembayaran hutang terhadap perekonomian justru negatif¹⁰.

Pada akhirnya tidak ada dampak yang benar benar positif bagi negara berekembang yang menerima pinjaman atau berhutang ke luar negeri, sebab hal

¹⁰ <http://www.koran-jakarta.com/dampak-utang-negara-/> pada Kamis 22/9/2016 | 00:00

ini kerap kali tidak diimbangi dengan adanya pertumbuhan, bahkan hutang luar negeri hanya akan membebani negara berkembang, karena ada beberapa negara yang memberikan pinjaman dengan syarat yang menuntut, adanya hutang luar negeri ini juga menjadikan negara berkembang tidak dapat mandiri, karena hanya akan bergantung pada perolehan hutang yang menjadi jalan pintas atas permasalahan finansial negara berkembang.

2.4 Studi Kasus: Utang Luar Negeri Indonesia

Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1998 VS 2017

Nominal Utang Luar Negeri Indonesia dari tahun 1998 sampai tahun 2017 memang menunjukkan kenaikan tahun demi tahun. Namun, jika kita melihat kondisinya, ternyata pada periode 2017 lebih baik atau terkendali dibandingkan dengan pada periode 1998 yang saat itu terjadi krisis. Baik, dilihat dari rasio terhadap cadangan devisa maupun dari sisi perekonomian (*Gross Domestic Bruto/GDP*).

Pada akhir 2017 ULN Indonesia mencapai angka US\$ 352,2 miliar atau setara dengan Rp 4.772 triliun. Hal tersebut mengindikasikan kenaikan sebesar 133,6% dibanding periode 1998. Sementara, terjadi juga kenaikan lebih tinggi pada cadangan devisa Indonesia sebesar 648%, yaitu menjadi US\$ 130,2 miliar, yang dianggap cukup untuk membiayai 8,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah. Disamping itu juga terjadi kenaikan pada PDB Indonesia yang tumbuh lebih besar dari utang luar negeri, yakni 742% menjadi US\$ 1.003 triliun. Pada saat krisis 1998, rasio utang luar negeri Indonesia mencapai 8,67 kali dari cadangan devisa dan 1,27 kali terhadap PDB. Tercatat PDB Indonesia 1998 sebesar 101.623 Triliun¹¹. Namun, pada akhir tahun lalu rasio utang luar negeri Indonesia menjadi hanya 2,71 kali terhadap cadangan devisa dan juga tinggal 0,35 kali terhadap PDB¹².

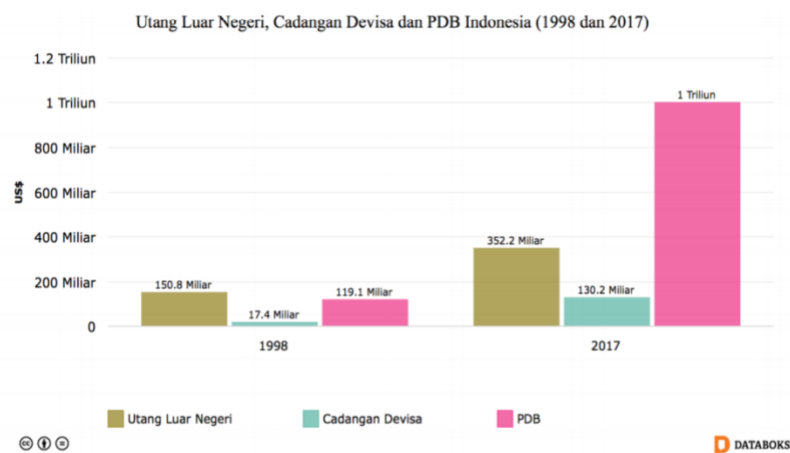
¹¹World Bank

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2000&locations=ID&start=1998∓view=chart#>

¹² Baca Databoks: Inilah Rasio Utang Luar Negeri Indonesia dan Utang Pemerintah

Mengingat krisis pada 1997-1998 salah satu penyebabnya adalah ULN pada korporasi swasta yang pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik atau tanpa dilakukan dengan *hedging*. Karena perlu kita ingat bahwa pada dasarnya, ULN itu memiliki banyak risiko. Menurut Menteri Keuangan era Joko Widodo, Sri Mulyani, krisis pada 1998 juga banyak direspons oleh negara dengan memberlakukan nilai tukar lebih fleksibel serta melakukan monitoring terhadap *capital inflow*, serta neraca keuangan korporasi, neraca keuangan pemerintah, hingga Bank Sentral¹³.

Grafik 2.1 ULN, Cadangan Devisa dan PDB Indonesia 1998 dan 2017



Sumber: Databoks.com

Jumlah utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dari tahun ketahun untuk pembangunan dan kebutuhan negara. Selama 2015-2018 Jokowi memimpin, menyebut ULN digunakan untuk membangun 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"¹⁴.

¹³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3708681/cerita-sri-mulyani-soal-penyebab-krisis-1998-dan-2008>

¹⁴ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43373257>

Grafik 2.2 Utang Pemerintah Republik Indonesia



Sumber: bem.uns.ac.id

Pada periode 1998 ULN didominasi oleh swasta dan pengelolaannya tidak baik. Sehingga, pemerintah harus membantu menyelesaikan pinjaman luar negeri sektor swasta yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis moneter. Diantaranya¹⁵:

1. Pemerintah Indonesia membuat Tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta (TPULNS). Hasilnya, Frankfurt pada 4 Juni 1998 tentang penyelesaian utang luar negeri swasta.
2. Dibentuk INDRA (*Indonesian Restructuring Assets*) untuk melindungi debitur Indonesia dari resiko perubahan nilai tukar pada jumlah hutangnya.
3. Prakarsa Jakarta (9 September 1998) untuk menyediakan akses bagi perusahaan agar dapat mendapatkan modal baru guna menggerakkan kembali usahanya.

Berbeda dengan pada periode 1998 ULN tidak dibarengi dengan peningkatan perekonomian Indonesia, pada tahun 2017 terjadi peningkatan. Dilihat dari sisi produksi sebesar 9,81%, pengeluaran 9,09%¹⁶. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman",

¹⁵ Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia

¹⁶ Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html>

karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara¹⁷.

Utang Luar Negeri Indonesia sampai saat ini tidak lepas dari para kreditur bilateral. Selama tahun 2017, total pinjaman yang diberikan Jepang mencapai US\$ 13,9 Miliar atau setara dengan Rp 187 Triliun.

Gambar 2.1 Kreditur Utang Indonesia



Jepang menjadi Negara yang sering memberikan pinjaman terhadap Negara lain termasuk Indonesia, memiliki konsep yang cukup cerdas. Jepang menerapkan aturan bahwa setiap Negara yang meminjam ke Jepang harus membayar pinjaman tersebut tepat waktu yang sudah disepakati. Apabila Negara peminjam tidak dapat membayar saat waktu yang disepakati, maka Jepang akan menawarkan pinjaman lagi. Maksud dari penambahan pinjaman ini agar Negara yang belum mampu membayar

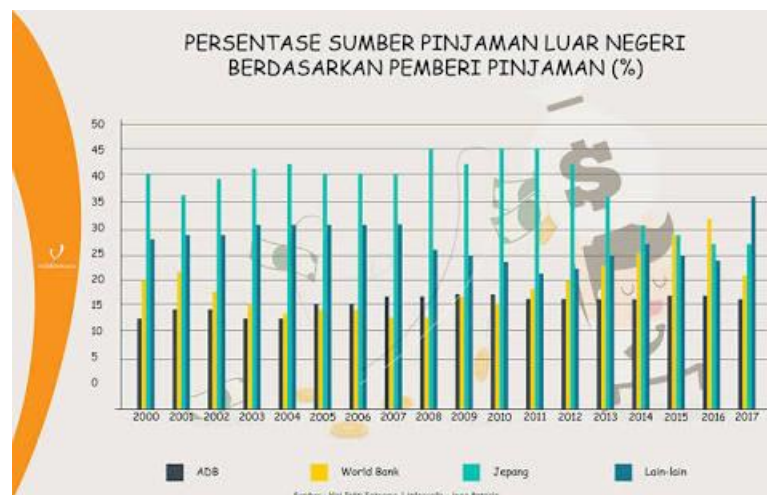
pinjaman dapat menggunakan tambahan pinjaman sebagai salah satu sumber pembayaran utang sebelumnya.

¹⁷ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43373257>

Selain konsep Jepang yang cukup cerdas, yang diterapkan oleh Jepang, ada beberapa faktor pendukung mengapa Indonesia lebih menerima hutang luar negeri Jepang. Faktor-faktor yang membuat Indonesia untuk berhutang dengan Jepang antara lain yaitu yang pertama Jepang memiliki GDR (Government Debit Ratio) tertinggi diantara negara-negara anggota G20. Lalu, rasio penerimaan pajak mereka terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) tinggi. Rasio pajak Jepang sekitar 36%.¹⁸ Kemudian faktor selanjutnya adalah investor dunia memiliki kepercayaan yang sangat tinggi pada Jepang.

Jika dikatakan negara yang ketergantungan dengan suatu hutang luar negeri, Indonesia bisa dikatakan demikian. Apalagi hutang luar negeri pada Jepang, jika dilihat dari konsep cerdas Jepang dalam membuat kebijakan pada suatu negara peminjam yang dapat membuat negara peminjam akan terus menerus berhutang dengan Jepang. Dengan demikian suatu ketergantungan akan terus ada. Contohnya, seperti Indonesia yang ketergantungan pada Jepang. Dari tahun ketahun hutang luar negeri Indonesia pada Jepang terus meningkat.

Grafik 2.3 Presentase Sumber Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman (%)



Sumber:

Persentase utang luar negeri Indonesia berdasarkan pemberi pinjaman, Jepang lebih banyak memberikan pinjaman luar negeri dibandingkan dengan ADB, bahkan dibandingkan dengan Bank Dunia dan lain-lainnya. Pada table

¹⁸Dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3917106/aman-mana-utang-indonesia-jepang-atau-as>. Diakses pada tanggal 09 Mei 2018 pukul 12.44 WIB.

diatas dapat dilihat dari tahun 200 hingga 2011 dengan jumlah pinjaman yang terus meningkat. Tetapi kemudian pada tahun 2012 ketahun 2015 yang persentasenya menurun drastis. Hal itu dikarenakan bergantinya kepemimpinanya itu presiden Indonesia yang dimana bergantinya kepemimpinan bergantinya juga kebijakan pada suatu negara.

Adanya suatu utang luar negeri ini membuat suatu negara berkembang, termasuk Indonesia menjadi tidak mandiri, bergantung dan hanya mengandalkan suatu pinjaman dari negara lain terutama dalam hal finansial. Didorong oleh faktor yang memudahkan akses pinjaman tersebutlah yang membuat negara berkembang terus menerus mengandalkan hutang luar negeri dan bantuan luar negeri. Padahal jika diteliti, negara pendonor tersebut memiliki suatu motif tertentu.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Utang luar negeri senantiasa akan selalu ada bagi negara berkembang. Meskipun, bukan berarti negara maju pun tidak luput dari hutang luar negeri. Baik digunakan untuk pembangunan atau pun untuk memenuhi kebutuhan.

Utang luar negeri Indonesia pada 1998 tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan 2017. Juga, pada 1998 ULN didominasi oleh swasta yang dibantu penyelesaiannya oleh pemerintah dengan berbagai upaya. Jumlahnya memang selalu mencengangkan, namun dari beberapa keterangan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani, saat ini Indonesia tetap berada pada batas aman tidak krisis utang selama tidak melebihi 60% dari total PDB.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sejak zaman kepemimpinan Soekarno hingga saat ini masih memiliki ketergantungan ULN. Indonesia masih memiliki ketergantungan finansial terhadap negara-negara kreditur, terutama Jepang.

3.2 Saran

Sebagai negara berkembang masih wajar bagi Indonesia memiliki hutang pada Jepang. Tetapi, alangkah lebih baik jika Indonesia mengurangi ketergantungan pada negara yang pernah menjajah Indonesia, Jepang. Negara kita memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Seharusnya, Indonesia mampu memaksimalkan pengolahan sumber daya alam nya sendiri. Berusaha menjadi negara yang tidak mengekspor barang mentah atau setengah jadi yang nilai jual nya rendah, sehingga devisa negara akan bertambah. Selain itu, saran kepada pembaca untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap utang luar negeri negara berkembang, termasuk Indonesia.